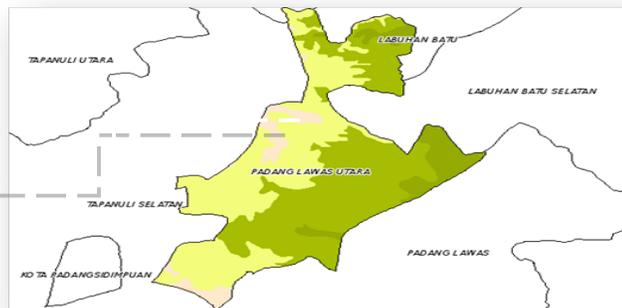




RENJA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025. Renja ini disusun sebagai gambaran perencanaan periode satu tahun yang sesuai tujuan, sasaran dan strategis pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) ini menguraikan rencana alokasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025, review pelaksanaan program dan kegiatan serta perencanaan perkiraan maju pada Tahun 2026. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan salah satu perwujudan dalam praktik pemerintah yang baik dengan disajikan secara subjektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian sasaran yang akan ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini tentunya masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan rencana kerja ini. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan Akhir Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 serta Untuk peningkatan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Gunungtua, 19 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOPEASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



IHPAN SIREGAR, S.Sos.,M.Si
NIP. 19660903 198602 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	30
3.3 Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
BAB V. PENUTUP.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam Pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan Masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seluruh dokumen Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan yang merupakan penjabaran rencana strategis Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal rencana Pembangunan daerah adalah rancangan rencana strategis perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman / acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RPD dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan Pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kebijakan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah dengan menerjemahkan, mengoperasionalkan ke dalam program dan kegiatan OPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program Pembangunan dan kegiatan pokok Pembangunan dalam 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2025 rencana kegiatan yang menjadi target pelaksanaan kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi kegiatan :

1. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi sebanyak 100 Orang.
2. Pelaksanaan Lembaga Pelatihann kerja Swasta di targetkan 1 Lembaga
3. Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota
4. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
5. Pengesahan peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 kab/Kota
6. Pengembagan usaha mikro denagan orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan tarhet 5 Unit Usaha.
7. Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan ,Kemudahan Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan target 1 Dokumen
8. Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Satu Kab/Kota target 5 Unit Usaha
9. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,Koperasi Simp[an [Pinjam /UnIT Simpan Pinjam Kop yang wilayah Keanggotannya 1 Kab/Kota target 10 Unit Usaha
10. Pelatihan dan Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Libntas Daerah Kab/Kota targetnya 20 Orang
11. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Lintas Dearah Kab/Kota Targertnya 3 Keluarga

Seterusnya adapaun prinsip-prinsip yang dianut dala setiap penyusunan rancangan awal rencana kerja antara lain :

1. Berpedoman pada renstra perangkat daerah dan mengacu pada RPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Rencana kerja) OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 37 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten padang lawas utara di propinsi sumetara utara;(Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007);
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentant Pemerintahan Daerah (lembaranan Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam peraturan peerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancanagan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klassifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klassifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahu 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klassifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 4 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 nomor 440, tambahan lembaran daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 16).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 08 tahun 2021 tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Kerja (Rencana kerja) OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan maksud sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang menyangkut bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan selama satu tahun berjalan dengan tujuan agar Program Kegiatan dapat terencana, terarah dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Maksud dari disusunnya suatu Rencana kerja adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Diskopukmnaker
- Menjadi Pedoman Penyusunan Sakip
- Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD;
- Menjadi Pedoman Penyusunan Sakip
- Mengetahui Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 Diskopukmnaker
- Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pilihan opd;
- Insruen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat;
- Dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Tujuan

Tujuan Penyusunan Ranwal Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- Untuk menyeragamkan langkah Perencanaan Pembangunan yang akan dilakukan di Daerah yang didasarkan pada perencanaan pusat, propinsi dan daerah terkait dengan Tupoksi OPD yang di emban.
- Memberikan arah, tujuan, sasaran strategis kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Tersedianya arah kebijakan teknis di Bidang Koperadsi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Untuk menilai dan melihat Kestinambungan Program OPD terhadap Kesejahteraan Rakyat.
- Tersusunnya Program dan Kegiatan Di lingkungan Koperasi saha Kecil dan Menengah dan Ketenagkaerjaan satu tahu kedaepan untuk kemedian di uraikan kedalam RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Sebagai Dokumen dasar bagi OPD terhadap tindakan Pengawasan dan sekaligus alat Monitor dan Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Negara dan Daerah terhadap Perencanaan Kegiatan dan Program serta Implementasinya di Masyarakat.
- Sebagai bahan dasar bagi OPD untuk menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan di masyarakat dan sebagai bahan masukan untuk OPD dalam menyempurnakan pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.
- Tersedianya Rumusan Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam pengelolaan Pemerintah yang merupakan indikator Program yang tertuang dan sebagai tolak ukur pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOPUKMNAKER Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Diskopukmnaker
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi diskopukmnaker
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELKSANAAN RENJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini, didasarkan atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahap Penyajian Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra tahun 2024-2026)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2026	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)	
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100,00%								
2 17 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7	Dokumen								
2 17 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen								
2 17 1 2 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen								
2 17 1 2 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Dokumen								

2	7	5	2	1	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	8	Laporan											
2	17	3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	%											
2	17	3	2	1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	5	Unit Usaha											
2	17	3	2	1	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit Usaha											
2	17	6				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100	%											
2	17	6	2	1		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabuoaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabuoaten/Kota	3	Unit Usaha											
2	17	6	2	1	9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3	Unit Usaha											
2	17	7				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100	%											

2	17	7	2	1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	60	Orang											
2	17	7	2	1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60	Orang											
2	17	8				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pemenuhan Pengembangan UMKM	100	%											
2	17	8	2	1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5	Unit Usaha											
2	17	7	2	1	2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	5	Unit Usaha											

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan pada kajian capaian Kinerja. Pelayanan sesuai indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian dapat disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No	Indikator	SM P/ Standar Nasional	IKU	Target Tenstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis																																
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026																																	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">komponen</th> <th colspan="3">Sub- Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub- Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub- Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub- Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Total Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	komponen	Sub- Komponen			Total Bobot	Sub- Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub- Komponen 2 Kualitas 30%	Sub- Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25	Total Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100									
					komponen	Sub- Komponen			Total Bobot																																				
				Sub- Komponen 1 Keberadaan 20%		Sub- Komponen 2 Kualitas 30%	Sub- Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																						
				Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																					
				Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																					
				Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																					
				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25																																					
Total Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																									
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			88,5	90,5	90,5																																							
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		Total Unsur yang terisi	0.62%	1%	1%																																							
4	Persentase Koperasi Aktif		Jumlah koperasi Aktif/Jumlah Seluruh koperasi X 100%	43%	48%	53%																																							
	Indikator	SM P/ Standar Nasional	IKK	Target Tenstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis																																
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026																																	

					2026		2025			n 20 24	n 20 25		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan akan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan Kab/Kota	100			100							
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Ytenaga kerja yang bersertifikat kompetensi/Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0,62			0,38							
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB Tahun Berjalan (atas Dasar harga Konstan)/ Jumlah Tenaga Kerja											
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/ Jumlah Perusahaan	100	100	100	100	100	100	100				

5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Jumlah Pencaker yang di tempatkan/ Jumlah Pencaker yang terdaftar	50			73,68						
6	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset/ Jumlah seluruh koperasi Aktif X 100%	75			7,33						
7	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha/ Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan X 100%	41,58			0,241						

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 39 Tahun 2023 bagian satu pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Yaitu :

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan sebagaimana dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan ketenagakerjaan.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi yang objektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- c. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- d. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- e. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- f. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- g. Mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- h. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- j. Mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- l. Menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RPD. Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

TABEL T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	2.786.780.628	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	2.786.780.628	
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Kegiatan	20.018.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2 Kegiatan	20.018.300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. PALUTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.489.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.489.200	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.176.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.176.600	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.773.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	4.773.300	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.579.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.579.200	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	Dokumen	2.142.592.028	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	Dokumen	2.142.592.028	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. PALUTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/Bulan	2.014.103.728	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. PALUTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/Bulan	2.014.103.728	
2	Penyediaan Administrasi Tugas	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Dokumen	125.760.000	Penyediaan Administrasi Tugas	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Dokumen	125.760.000	

	ASN	TA	Administrasi Tugas ASN			ASN	TA	Administrasi Tugas ASN			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.728.300	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.728.300	
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	1 Paket	27.709.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	orang	27.709.500	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB. PALU TA	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	27.709.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB. PALU TA	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	27.709.500	
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. PALU TA	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	325.023.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. PALU TA	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	325.023.200	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.652.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.652.400	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.920.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.920.600	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB. PALU TA	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	6.773.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB. PALU TA	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	6.773.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.993.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.993.600	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.266.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. PALU TA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.266.800	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. PALU TA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.597.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. PALU TA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.597.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	168.819.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	168.819.800	

v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB. PALU TA	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Kegiatan	11.086.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB. PALU TA	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Kegiatan	11.086.400	
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALU TA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	11.086.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALU TA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	11.086.400	
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. PALU TA	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	119.981.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. PALU TA	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	119.981.200	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.300.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.440.000	
3	Penyediaan Jasa Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	KAB. PALU TA	Jumlah Pemakaian Internet	12 Laporan	24.000.000	Penyediaan Jasa Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	KAB. PALU TA	Jumlah Pemakaian Internet	12 Laporan	24.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.241.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. PALU TA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.241.200	
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Kegiatan	140.370.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Kegiatan	140.370.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. PALU TA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	120.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. PALU TA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	120.160.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALU TA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	20.210.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALU TA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	20.210.000	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. PALU TA	Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	1.000.000.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. PALU TA	Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	1.000.000.000	
vii i	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			100 Orang	1.000.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			100 Orang	1.000.000.000	

1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	KAB. PALU TA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	1.000.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	KAB. PALU TA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	1.000.000.000
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	KAB. PALU TA	Persetase Penempatan Tenaga Kerja		0	Program Penempatan Tenaga Kerja	KAB. PALU TA	Persetase Penempatan Tenaga Kerja		0
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media cetak			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media cetak		
	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja		0	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja		
4	Program Hubungan Industrial	KAB. PALU TA	Terlaksananya Penetapan UMKAB	1 Kegiatan	600.000.000	Program Hubungan Industrial	KAB. PALU TA	Terlaksananya Penetapan UMKAB	1 Kegiatan	600.000.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	KAB. PALU TA	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	8 Perusahaan	600.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	KAB. PALU TA	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (pp/pkb.Struktur skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	8 Perusahaan	600.000.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten kota	KAB. PALU TA				Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten kota	KAB. PALU TA			
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1	KAB. PALU TA				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1	KAB. PALU TA			

	(satu) Kab/Kota					(satu) Kab/Kota					
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Kab/Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (pp/pkb.Struktur skala Upah dan LKS Biparti dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Kab/Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (pp/pkb.Struktur skala Upah dan LKS Biparti dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan			
5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	KAB. PALU TA	Pendataan Potensi Eks Transmigrasi		0	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	KAB. PALU TA	Pendataan Potensi Eks Transmigrasi			0
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari I (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen			Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari I (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen			
	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB. PALU TA				Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB. PALU TA				
6	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Unit Usaha	21.263.400	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Unit Usaha		21.263.400
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	KAB. PALU TA	Jumlah Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi			Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	KAB. PALU TA	Jumlah Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	Unit Usaha		
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	KAB. PALU TA	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	15 Unit Usaha	21.263.400	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	KAB. PALU TA	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	15 Unit Usaha		21.263.400
	Peningkatan Kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, Mandiri Tangguh serta	KAB. PALU TA	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, Tangguh serta Akuntabel			Peningkatan Kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, Mandiri Tangguh serta	KAB. PALU TA	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, Tangguh serta Akuntabel			

	Akuntabel					Akuntabel					
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	KAB. PALU TA	Persentase PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3 Unit Usaha	42.058.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	KAB. PALU TA	Persentase PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3 Keluarga	42.058.000	
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabuoaten/Kota	KAB. PALU TA	Jumlah Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabuoaten/Kota			Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu)daerah provinsi	KAB. PALU TA	Jumlah Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu)daerah provinsi			
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. PALU TA	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	42.058.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. PALU TA	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	42.058.000	
	Pemenuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang mengikuti pemenuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf Hidup keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan ekonomi Lainnya			Pemenuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang mengikuti pemenuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf Hidup keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan ekonomi Lainnya			
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	17 orang	53.082.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	orang	53.082.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	KAB. PALU TA	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan, Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku kepentingan	KAB. PALU TA	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	KAB. PALU TA	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha	60 Orang	53.082.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	KAB. PALU TA	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha	60 Orang	53.082.000	

			Mikro					Mikro			
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Perizinan			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Perizinan			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan Kompetensi SDM/Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan Kompetensi SDM/Usaha Mikro dan Kewirausahaan	KAB. PALU TA	Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	KAB. PALU TA	Persentase Pemenuhan Pengembangan UMKM	unit usaha	74.109.200	Program Pengembangan UKM	KAB. PALU TA	Persentase Pengembangan UKM	unit usaha	74.109.200	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	KAB. PALU TA	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	KAB. PALU TA	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil			
	Pengembangan Usaha Mikro	KAB. PALU TA	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	5 Unit Usaha	74.109.200	Pengembangan Usaha Mikro	KAB. PALU TA	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	5 Unit Usaha	74.109.200	
	Produksi dan Pengolahan, pemasaran, Sumber daya manusia, serta desain dan Teknologi		Jumlah Unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan Tehnologi			Produksi dan Pengolahan, pemasaran, Sumber daya manusia, serta desain dan Teknologi	KAB. PALU TA	Jumlah Unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan Tehnologi			
JUMLAH					4.577.293.228	JUMLAH					4.577.293.228

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan Pertimbangan prinsip penyelenggaraan Pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan Tingkat Kabupaten, responsive terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di Masyarakat khususnya terkait dengan perumusan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Namun, pada tahun 2025 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Kebijakan Nasional tertuang di dalam RPJMN, dan juga dirumuskan dalam RPD dan juga dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Dengan prioritas yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan ;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing ;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan Dasar ;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim ; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam dokumen Rancangan Akhir Renja , Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan menetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Uaha Kecil dan Menengah.

3.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi tersebut di atas, tujuan pembangunan sektor Koperasi ,UKM dan Ketenagakerjaan adalah:

- ❖ Sektor Koperasi
 - a. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Badan Usaha Koperasi
 - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi sejak usia dini
 - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi.
 - d. Mengajak masyarakat mendirikan koperasi termasuk kepada kelompok ekonomi produktif
 - e. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa koperasi dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat
- ❖ Sektor UKM :
 - a. Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan Masyarakat
 - b. Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah / swasta.
 - d. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa Usaha Kecil dan Menengah dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat
 - e. Pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah.
- ❖ Sektor Ketenagakerjaan
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
 - b. Memberikan Pengetahuan Kepada Pencari Kerja dengan Mengadakan Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan.
 - c. Mengurangi Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja
 - d. Meningkatkan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada
 - e. Menyebarluaskan Informasi pasar kerja

3.2.2. Sasaran

- a. Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (*Cooperative – Minded*)

- b. Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (*Capacity Building*)
- c. Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
- d. Meningkatkan kualitas dan Produktivitas Ketenagakerjaan
- e. Memberikan Pengetahuan kepada pencari kerja dengan mengadakan kegiatan pelatihan Keterampilan
- f. Mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan kerja
- g. Meningkatkan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada
- h. Mengidentifikasi calon lokasi pemukiman transmigrasi
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks Transmigrasi dan sekitarnya
- j. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat eks Transmigrasi dengan Masyarakat Sekitar.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan maka program yang akan dilakukan adalah :

❖ Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Perkembangan UMKM

❖ Kegiatan

1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasai Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
9. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
10. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi
11. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota
12. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
13. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN				4.577.29 3.228,00								4.503.61 0.501,00		
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.577.29 3.228,00								4.503.61 0.501,00		
	2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.000.00 0.000,00								1.000.00 0.000,00		
1	2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pemenuhan pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 Persen	100 Persen	1.000.00 0.000,00						100 Persen	1.000.00 0.000,00		
	2	7	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Berdasarkan Klaster Kompetensi	300 Orang	100 Orang	1.000.00 0.000,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	PENCAKRI KERJA	100 Orang	1.000.00 0.000,00	
	2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											

4	2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	70Persen BBPre dikat				BB Predikat 70 Persen	2.786.780.628,00					70Persen BBPre dikat	3.112.873.101,00		
	2	17	1	2.011	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4Dokumen				4 Dokumen	20.018.300,00		Mempertuakan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusi Pemulihan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	4Dokumen	40.753.100,00		
	2	17	1	2.011	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				4 Dokumen	5.489.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempertuakan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusi Pemulihan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2	17	1	2.011	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kel/Desa	dan Berkeadilan							
	2	17	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3Kegiatan		3 Kegiatan	2.142.592.028,00	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-	3Kegiatan	2.457.991.221,00			
	2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan			252 Orang/bulan	2.014.103.728,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DAN ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	-	216 Orang/bulan	2.329.216.121,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
	2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	27.709.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Kel/Desa	DAN A TRANSFER UMU M-DAN A ALOKASI UMUM	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	1 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7Kegiatan			7 Kegiatan	325.023.200,00			Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	7Kegiatan	186.928.780,00	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	6.652.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Kel/mata	DAN A TRANSFER UMU M-DAN A ALOKASI UMUM	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	1 Paket	6.652.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

5	2	17	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMENUHAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	65 persen			65 persen	21.263.400,00					70 persen	4.000.000,00		
	2	17	3	2.011	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota	45Unit usaha				21.263.400,00		Mempertuahkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	Koperasi	15Unit usaha	4.000.000,00		
	2	17	3	2.011	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	5 Unit Usaha			15 Unit Usaha	21.263.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU DAN ALOKASI UMUM	Mempertuahkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi	Koperasi	5 Unit Usaha	4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

6	2	1	4		PROGRA M PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Pemenuhan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	70 Persen			65 Persen	0,00				70 Persen	4.000.00 0,00				
	2	1	4	2. 0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Satu daerah kabupaten/kota	15Unit usaha			65 Persen	0,00		Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi Untuk Pertu mbuhan Yang Berku alitas dan Berkeadila	Pening katan Pertu mbuhan Ekono mi Inklusi f Pemuli han Ekono mi	Koperas i	5Unit usaha	4.000.00 0,00			
	2	1	4	2. 0 1	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	5 Unit Usaha			5 Unit Usaha	0,00		Kab. Pada ng Lawa s Utara , Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M	Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi Untuk Pertu mbuhan Yang Berku alitas dan Berkeadila	Pening katan Pertu mbuhan Ekono mi Inklusi f Pemuli han Ekono mi	Koperas i	5 Unit Usaha	4.000.00 0,00	DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGA H DAN KETENAG AKERJAA N

7	2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	75 Persen				70 Persen	0,00				70 Persen	201.968.700,00				
	2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	600Orang				20 Orang	0,00			Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusi Pemulihan Ekonomi	Koperasi	200Orang	201.968.700,00		
	2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang				20 Orang	0,00		Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - PK2U KM	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusi Pemulihan Ekonomi	Koperasi	20 Orang	201.968.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
8	2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 Persen				100 Persen	42.058.000,00					100 Persen	17.000.000,00			

						PERSENTASE PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BBPre dikat			70 Persen						BBPre dikat			
X	X	X	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen			4 Dokumen	40.753.100,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN TRANSFER UMU M-DAN ALOKASI UMUM	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	4 Dokumen	40.753.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
X	X	X	1	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
						Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan			3 Kegiatan	2.448.578.855,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN TRANSFER UMU M-DAN ALOKASI UMUM	Mempertkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pemulihan Ekonomi		3 Kegiatan	2.457.991.221,00	
X	X	X	1	2	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna Mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara 2024-2026 dan secara khusus mewujudkan prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam tema RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Adapun Sumber pendanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Pagu anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebesar Rp. 4.577.293.228,- terdiri dari 7 (Tujuh) Program dan 13 (Tiga Belas) Kegiatan sebagai berikut :

TABEL 4.1
Renja Tahun 2025
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.786.780.628
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.018.300
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.489.200
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.176.600
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.773.300
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.579.200
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.142.592.028
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.014.103.728
2	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	125.760.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.728.300
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.709.500
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.709.500
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.023.200
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.652.400
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.920.600
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.773.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.993.600
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.266.800
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.597.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.819.800
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.086.400
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.086.400
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.981.200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.440.000
3	Penyediaan Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.241.200
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.370.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.160.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.210.000

2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.000.000.000
VIII	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.000.000.000
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.000.000.000
3	Program Hubungan Industrial	600.000.000
IX	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	600.000.000
4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	21.263.400
X	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	
1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	21.263.400
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	42.058.000
XI	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota	
1	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	42.058.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	53.082.000
XII	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	53.082.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	74.109.200
XIII	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
1	Pengembangan Usaha Mikro	74.109.200
	TOTAL	4.577.293.228

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hal terkait dengan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta diupayakan dapat meningkat setiap tahun mengingat sasaran program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan sangat kompleks baik jenis maupun jumlahnya. Jika kondisi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan program, maka dalam penyusunan program akan ditetapkan skala prioritas kegiatan yang sangat mendesak dan berkaitan dengan kepentingan Masyarakat.
2. Untuk kelancaran kegiatan dalam perumusan kegiatan selalu memperhatikan usulan kegiatan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan melalui forum musrenbang, juga memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis pada setiap program / kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
3. Rencana Tindak lanjut dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan adalah :
 - Evaluasi terhadap keseluruhan program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi program/kegiatan selanjutnya

- Secara berkelanjutan melaksanakan bimbingan teknis bagi staf yang melaksanakan kegiatan teknis mengingat program/kegiatan senantiasa ada perubahan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Gunungtua, 19 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



MIFAN SIREGAR, S.Sos.,M.Si
NIP. 19650903 198602 1 003